

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BAGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Walburga Nofri Guntur^{1*}, Yohanes Tuan², Norani Asnawi³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: gurnofri25@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: tuanjohn902@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This article analyzes the implementation of public information disclosure through the website of the Manggarai Regency Government, in terms of the principle of openness in state administration law. This research also identifies the obstacles and impacts of public information disclosure implementation on local government accountability. The research method used is empirical law with a juridical and qualitative approach. Primary data was collected through interviews and questionnaires from officials of the Communication and Information Office and the public who access the website. Secondary data was obtained from literature review, laws and regulations, website documentation, and related research reports. The results show that the implementation of public information disclosure has not been optimal. The quality of information and website updates need to be improved, not fully fulfilling the principles of openness. The internal obstacles are limited human resources and lack of coordination between OPDs. External barriers are inadequate technological infrastructure and low public awareness of public information disclosure. As a result, government accountability is affected, public trust decreases, and there is potential for disinformation and cyber security threats.

Keywords: E-government Implementation; Public Information Disclosure; Government Website.

1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah hak rakyat dan esensi pemerintahan yang adil dan transparan. Rakyat berhak mengetahui kebijakan dan program pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterbukaan informasi mendorong akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik. Keterbukaan informasi juga meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dengan melibatkan rakyat dan menghasilkan masukan berharga. Keterbukaan informasi publik adalah kunci membangun pemerintahan yang baik Sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Di era globalisasi sekarang ini suatu informasi menjadi cepat tersebar dan sangat penting. Selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk Informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya. Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini sekaligus sebagai upaya demokratisasi maka pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut. Aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang

pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terealisasi dengan baik.

Konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia¹. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini selaras dengan Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik (AUPB), yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme². Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Asshiddiqie menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi³. Selanjutnya Budi Santosa, mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan⁴.

Sejalan dengan era digital ini, tuntutan akan keterbukaan informasi publik semakin tinggi. Masyarakat Kabupaten Manggarai pun menginginkan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik sehingga pada tahun 2019 meluncurkan website resmi sebagai salah satu upaya untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Website ini memuat berbagai informasi, seperti profil pemerintah daerah, program dan kegiatan, anggaran, laporan kinerja, berita terbaru, dan regulasi. Oleh karena itu melalui website resmi pemerintah kabupaten ini diharapkan dapat menjadi *platform* yang efektif untuk menyediakan informasi publik yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Implementasi *e-government* di Kabupaten Manggarai juga didasari oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua

¹ Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945

² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi, Membangun Demokrasi dan Masyarakat Madani* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003, 134.

⁴ Budi Santosa. *Membangun Good Governance Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008, 133.

peraturan ini mewajibkan pemerintah untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Adapun regulasi yang dibuat pemerintah kabupaten Manggarai yaitu dengan dibuatnya Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik⁵. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara teori dan praktek. Website pemerintah yang dibayangkan sebagai jendela informasi yang terang benderang, masih diselimuti kabut keterbatasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, jumlah penduduk Manggarai per April 2024 mencapai 334.464 jiwa (diakses 16 April 2024)⁶. Di sisi lain, data dari website Pemkab Manggarai menunjukkan jumlah pengunjung yang terbilang rendah. Pada 16 April 2024, hanya terdapat 8 pengunjung, sedangkan di hari sebelumnya (15 April 2024) tercatat 11 pengunjung. Dalam satu pekan, total pengunjung mencapai 19 orang, 172 orang dalam 4 bulan terakhir, 1207 orang di periode April 2023 - April 2024, dan total 18.334 pengunjung sejak website dibuat di tahun 2019⁷. Angka pengunjung yang rendah ini, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang besar, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Manggarai yang belum familiar dengan website Pemkab Manggarai. Dari data tersebut juga dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi e-government di Kabupaten Manggarai.

Konsep *Good Governance*: *Good governance* adalah sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan⁸. Prinsip utama *good governance* mencakup partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik⁹. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara¹⁰. Konsep *E-Government*: *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan transparansi administratif¹¹. Model interaksi dalam *e-government* meliputi *Government-to-Citizen* (G2C), *Government-to-Business* (G2B), dan *Government-to-Government* (G2G)¹². Keunggulan *e-government* terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan prosedur layanan, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan mempercepat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat¹³. Pemerintah Kabupaten Manggarai sedang dalam proses implementasi e-Government, dengan fokus utama

⁵ Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

⁶ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Manggarai, *Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai*, Diakses pada 16 April 2024, dari <https://manggaraikab.bps.go.id/>

⁷ Website Pemerintah, Kabupaten Manggarai, *Pengunjung Website*, Diakses pada 16 April 2024, dari <https://www.manggaraikab.go.id/>

⁸ Sirajudin, M., dkk. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, (Malang : Setara Press, 2011), 38-39.

⁹ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2003), 208.

¹⁰ Sirajudin, M., dkk. "Good Governance dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* : Universitas Gadjah Mada Vol.14(2) (2008) : 39-40.

¹¹ Syaifuddin, A., *E-Government: Menuju Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berkinerja* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 1.

¹² Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas. Pemerintahan elektronik*, Diakses pada 2 April 2024, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik.

¹³ Wijayanto, T., "E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik: Sebuah Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang." *Jurnal Administrasi Publik* volume 24 no 2 (2020) : 186.

pada model G2C dan G2G. Namun, tantangan utama implementasi *e-government* meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di masyarakat, serta kurangnya integrasi sistem antarinstitusi¹⁴. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi pengembangan *e-government* mencakup peningkatan infrastruktur, standarisasi sistem, serta pelatihan sumber daya manusia¹⁵.

Implementasi *e-government*, sebagai upaya penggunaan TIK dalam pemerintahan, sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama menurut George C. Edwards III¹⁶. Pertama, komunikasi yang jelas dan efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak terkait sangat krusial agar semua memahami tujuan dan cara pelaksanaannya. Kedua, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik SDM, anggaran, peralatan, maupun infrastruktur, akan memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Ketiga, disposisi atau sikap positif, komitmen tinggi, dan motivasi kuat dari para pelaksana kebijakan akan mendorong implementasi yang lebih baik. Keempat, struktur birokrasi yang baik, dengan prosedur yang jelas, koordinasi efektif, dan mekanisme kontrol memadai, akan mendukung implementasi kebijakan yang efisien. Keempat variabel ini saling berkaitan, sehingga kekurangan pada satu variabel dapat menghambat atau menggagalkan implementasi kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap individu untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008¹⁷. Prinsip keterbukaan mencakup transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kepentingan publik¹⁸. Informasi yang wajib tersedia bagi publik mencakup kebijakan, keuangan, serta program dan kegiatan pemerintah¹⁹. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi keterbukaan informasi publik, seperti kurangnya ketersediaan data secara daring, keterbatasan SDM dalam pengelolaan informasi, serta ketidaksinkronan antarinstitusi dalam penyajian informasi²⁰. Solusi untuk meningkatkan keterbukaan informasi mencakup penguatan regulasi, optimalisasi teknologi digital, serta sosialisasi kepada masyarakat²¹.

Website pemerintah berperan sebagai sarana utama penyampaian informasi publik dan layanan daring kepada masyarakat²². Manfaatnya meliputi peningkatan transparansi, efisiensi layanan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan

¹⁴ Kurniawati, D., "Analisis Kualitas Website Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Menyediakan Informasi Publik". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* volume 25 no 1 (2021) 76.

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, September 2002", 3-8.

¹⁶ George C. Edwards III, "Implementing Public Policy" (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 1-125.

¹⁷ R Muhammad Miharadi. "Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 39.

¹⁸ Basuki Reksodigdo, "Keterbukaan Informasi Publik: Pilar Penting Good Governance". *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada*. Volume 14 no 2 (2008) 234-245.

¹⁹ Basuki, R. . *Hukum Keterbukaan Informasi Publik: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), 87-92.

²⁰ Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) dalam laporan pada tahun 2022, 10-25.

²¹ Hidayat, K., *Membangun demokrasi berkualitas: Dari politik prosedur ke politik substansi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 125.

²² Purwanto, A.J.. *E-Government di Indonesia: Studi Implementasi dan Analisis*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2019), 42.

²³. Namun, pengelolaan website pemerintah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dalam pembaruan data, kurangnya standar teknis, serta minimnya sosialisasi pemanfaatan layanan digital kepada masyarakat ²⁴. Untuk mengoptimalkan website pemerintah, diperlukan kebijakan yang jelas dalam Pengelolaan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam memastikan aksesibilitas informasi bagi publik. Untuk memahami lebih lanjut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama. Pertama, bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai ditinjau dari asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara? Kedua, apa saja hambatan dan dampak dalam implementasi keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap akuntabilitas pemerintah daerah?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai. Kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta dampak dalam implementasi keterbukaan informasi publik melalui platform digital tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait implementasi e-government dalam keterbukaan informasi publik. Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mengatasi hambatan dalam implementasinya. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dampak keterbukaan informasi publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam studi lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi publik berbasis e-government.

Keaslian penelitian ini dijamin berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan. Penelitian ini membahas secara spesifik implementasi e-government bagi keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai. Tidak ditemukan penelitian yang sama, namun terdapat penelitian terdahulu yang membahas analisis transparansi penyajian informasi publik berbasis e-government pada website Pemerintah Daerah Jawa Barat. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian. Penelitian ini lebih spesifik pada website Pemkab Manggarai dan dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sedangkan penelitian terdahulu lebih luas mencakup berbagai website pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai, menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk

²³ Suryanto, A. *E-Government di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Prospek*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung Press, 2019), 43-44.

²⁴ Wahyudi, D. *E-Government: Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018, 54.

menganalisis peraturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan e-government, sementara pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memahami implementasi yang terjadi. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai serta masyarakat pengguna website, serta data sekunder dari kajian pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling untuk pejabat pemerintah dan stratified random sampling untuk masyarakat pengguna website guna memastikan keberagaman responden. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dengan pejabat terkait, kuesioner untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, serta dokumentasi terhadap regulasi dan laporan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi guna mendapatkan pemahaman yang lebih sistematis tentang efektivitas implementasi e-government di Kabupaten Manggarai.

3. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik, adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Website pemerintah menjadi sarana penting untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kepentingan publik. Penelitian ini mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan website Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Manggarai, sehingga berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan kepercayaan publik. Implementasi e-government untuk keterbukaan informasi publik melalui website pemerintah daerah akan dianalisis berdasarkan 4 variabel utama dalam kerangka teori George C. Edwards III, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan krusial dalam keberhasilan implementasi e-government demi terwujudnya keterbukaan informasi publik. Komunikasi yang efektif memastikan informasi tersampaikan kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan mudah diakses, serta membuka ruang bagi umpan balik. Untuk menganalisis variabel komunikasi dalam konteks ini, peneliti menggunakan data dari 26 jenis informasi yang tersedia di situs web pemerintah daerah. Data ini diperoleh melalui kuesioner masyarakat guna mengidentifikasi tingkat akses, pemahaman, dan pemanfaatan informasi publik. Kuesioner ini juga mencakup tujuan penggunaan informasi, kemudahan akses, dan kendala yang mungkin dihadapi masyarakat. Data dari 26 jenis informasi akan membantu menganalisis ketersediaan informasi. Dengan mengamati frekuensi dan tujuan penggunaan informasi, kita dapat menilai apakah informasi yang ada relevan dan dibutuhkan. Informasi tentang kemudahan dan kendala akses juga akan memberikan gambaran terkait desain situs web, apakah telah memfasilitasi akses informasi publik. Terakhir, data mengenai kendala akses dapat memberikan petunjuk terkait potensi

masalah dalam kejelasan dan akurasi informasi, serta umpan balik. Misalnya, kesulitan akses dapat mengindikasikan informasi yang kurang jelas atau sulit ditemukan.

Dengan demikian, data dari tabel ini akan menjadi landasan analisis yang kuat untuk memahami variabel komunikasi dalam implementasi *e-government* demi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Manggarai:

1) Ketersediaan Informasi

Website Pemerintah Kabupaten Manggarai menyediakan beragam informasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari berita umum dan COVID-19, hingga program kerja, layanan publik, pariwisata, dan produk hukum. Keberagaman ini menunjukkan potensi website sebagai sumber informasi yang lengkap bagi masyarakat. Tabel 1 menyajikan 26 jenis informasi yang tersedia di website, beserta keterangan mengenai frekuensi penggunaan, tujuan penggunaan, kemudahan akses, dan kendala akses. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi dengan informasi yang tersedia pada website ini.

Tabel 1. Jenis Informasi Yang Tersedia Dalam Website Pemerintah Kabupaten Manggarai

| No | Jenis Informasi (URL) | Isi Informasi | Keterangan (Frekuensi Penggunaan, Tujuan Penggunaan, Kemudahan Akses, Kendala Akses) |
|----|---|---|--|
| 1 | Berita Umum https://www.manggaraikab.go.id/berita-umum/ | Bagian ini menyajikan informasi ringkas kegiatan pemerintah daerah, termasuk aktivitas pejabat dan instansi. | Masyarakat sangat sering mengakses berita umum untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kegiatan pemerintah daerah, dan informasi ini mudah ditemukan di website. |
| 2 | Berita Covid-19 https://www.manggaraikab.go.id/berita-covid-19/ | Berisi informasi perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Manggarai dari tahun 2020 hingga 2022. bagian ini menyediakan arsip data penting selama masa pandemi, yang berguna untuk studi atau referensi historis. | Masyarakat sering mengakses berita Covid-19 untuk memantau perkembangan pandemi dan kebijakan pemerintah terkait, dan informasi ini mudah diakses karena disajikan secara ringkas dan jelas. |
| 3 | Berita Program Kerja https://www.manggaraikab.go.id/berita-program-kerja/ | Informasi tentang program kerja Pemkab Manggarai memberikan informasi tentang rencana dan kegiatan pemerintah. | Masyarakat cukup sering mengakses berita program kerja untuk mengetahui program-program pemerintah yang sedang berjalan, meskipun informasi yang tersedia kurang |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | Berita Olahraga https://www.manggaraikab.go.id/berita-olahraga/ | Berita tentang kegiatan olahraga lokal di Kabupaten Manggarai. | detail untuk beberapa program, namun tetap mudah diakses. Masyarakat jarang mengakses berita olahraga karena hanya menarik bagi segmen tertentu yang menyukai olahraga, namun informasi ini tetap mudah ditemukan di website. |
| 5 | Berita Kesehatan https://www.manggaraikab.go.id/berita-kesehatan/ | Memberikan informasi terkait isu kesehatan di Kabupaten Manggarai. | Masyarakat cukup sering mengakses berita kesehatan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dan layanan kesehatan, terutama saat terjadi wabah penyakit, dan informasi ini mudah ditemukan. |
| 6 | Berita Siaran Pers https://www.manggaraikab.go.id/berita-siaran-pers/ | Menyediakan pernyataan resmi pemerintah Kabupaten Manggarai / siaran pers. | Masyarakat sedang mengakses berita siaran pers untuk mengetahui informasi resmi dari pemerintah, dan informasi ini disajikan secara lengkap serta mudah diakses. |
| 7 | Berita Lelang https://www.manggaraikab.go.id/berita-lelang/ | Informasi tentang lelang dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Pemkab Manggarai.. | Masyarakat jarang mengakses berita lelang karena hanya menarik bagi kalangan tertentu yang tertarik dengan tender atau lelang, meskipun informasi yang tersedia cukup mudah diakses namun kurang detail. |
| 8 | Berita Lalu Lintas https://www.manggaraikab.go.id/berita-lalu-lintas/ | Informasi tentang lalu lintas di Kabupaten Manggarai. Berpotensi memberikan informasi penting terkait kondisi lalu lintas. | Masyarakat jarang mengakses berita lalu lintas karena hanya menarik bagi pengguna jalan, namun informasi ini mudah ditemukan di website. |
| 9 | Berita Info Pendidikan https://www.manggaraikab.go.id/berita-info-pendidikan/ | Memberikan informasi terkait pendidikan di Kabupaten Manggarai. | Masyarakat cukup sering mengakses berita info pendidikan untuk mencari |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| | manggaraikab .go.id/berita- info- pendidikan/ | | informasi tentang pendidikan, seperti pengumuman sekolah, beasiswa, atau informasi kurikulum, dan informasi ini mudah ditemukan di website. |
| 10 Berita | Pariwisata https://www.manggaraikab .go.id/berita- pariwisata/ | Informasi tentang pariwisata di Kabupaten Manggarai, Mempromosikan potensi pariwisata daerah. | Masyarakat sering mengakses berita pariwisata untuk mencari informasi tentang destinasi wisata, akomodasi, atau event pariwisata, dan informasi ini disajikan dengan menarik serta mudah diakses. |
| 11 Berita | Pengumuman https://www.manggaraikab .go.id/berita- pengumuman / | Menyampaikan informasi penting kepada publik Pengumuman dari Pemkab Manggarai. | Masyarakat cukup sering mengakses berita pengumuman untuk mencari informasi terkait pengumuman lowongan kerja, tender, atau informasi penting lainnya, dan informasi ini mudah diakses karena ditampilkan di halaman utama website. |
| 12 Mengenal | Manggarai https://www.manggaraikab .go.id/menge- nal- manggarai/ | Memberikan informasi dasar tentang daerah Kabupaten Manggarai, seperti sejarah, budaya, dan potensi daerah. | Masyarakat sedang mengakses mengenal Manggarai untuk mengenal lebih dalam tentang daerahnya, seperti sejarah, budaya, atau potensi daerah, dan informasi ini disajikan dengan lengkap serta menarik dan mudah diakses. |
| 13 Layanan | Publik https://www.manggaraikab .go.id/layanan- publik/ | Informasi tentang prosedur layanan publik di Kabupaten Manggarai. Berpotensi memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. | Masyarakat cukup sering mengakses layanan publik untuk mencari informasi terkait prosedur perizinan, pembuatan KTP, atau layanan publik lainnya, meskipun informasi yang tersedia cukup mudah diakses namun terkadang sulit dipahami. |

- | | | |
|--|--|---|
| 14 Pemerintahan https://www.manggaraikab.go.id/pemerintahan/ | Informasi tentang struktur pemerintahan Kabupaten Manggarai. Memberikan informasi tentang organisasi pemerintah daerah. | Masyarakat sedang mengakses pemerintahan untuk mencari informasi tentang struktur pemerintahan daerah, dan informasi ini disajikan dengan jelas, terstruktur, serta mudah diakses. |
| 15 Informasi Daerah https://www.manggaraikab.go.id/informasi-daerah/ | Berita dan informasi tentang Kabupaten Manggarai. Mirip dengan Berita Umum, memberikan informasi sekilas tentang daerah. | Masyarakat sering mengakses informasi daerah untuk mencari informasi umum tentang daerah, seperti berita terbaru, event, atau informasi penting lainnya, dan informasi ini mudah ditemukan di website. |
| 16 Statistik https://manggaraikab.bps.go.id/id | Data statistik tentang Kabupaten Manggarai. | Masyarakat jarang mengakses statistik karena hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan data statistik untuk penelitian atau keperluan lainnya, meskipun data yang tersedia cukup mudah diakses namun terkadang sulit ditemukan atau diolah. |
| 17 Inovasi Daerah https://www.manggaraikab.go.id/communitiy/ | Berisi informasi terkait inovasi daerah dalam pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sejauh ini baru 4 inovasi daerah yang di tampilkan dalam website ini yaitu Inovasi Safari ODGJ, SIPAMANTRI yaitu aplikasi berbasis android yang berisi informasi pariwisata di Manggarai, METARUNG yaitu media tata ruang Manggrai dan Inovasi ASN sadar pajak. | Masyarakat jarang mengakses inovasi daerah karena hanya menarik bagi masyarakat yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan inovasi di daerah, namun informasi ini disajikan dengan menarik dan mudah diakses. |
| 18 Transparansi https://www.manggaraikab.go.id/informasi-keuangan/ | Fitur ini berisi informasi terkait anggaran, laporan keuangan, dan proses pengadaan. Informasi ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. | Masyarakat sedang mengakses transparansi karena peduli dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, dan informasi ini tersedia namun terkadang sulit dipahami serta cukup mudah diakses. |

| | | |
|---|--|--|
| 19 Informasi Harga https://www.manggaraikab.go.id/informasi-harga/ | Informasi tentang harga kebutuhan pokok di Kabupaten Manggarai. Berpotensi memberikan informasi penting terkait harga pasar. | Masyarakat jarang mengakses informasi harga karena hanya ingin mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar, dan informasi ini mudah ditemukan serta diakses. |
| 20 Informasi Pertanian https://www.manggaraikab.go.id/informasi-pertanian/ | Memberikan informasi terkait sektor pertanian di Kabupaten Manggarai. | Masyarakat jarang mengakses informasi pertanian karena hanya dicari oleh masyarakat yang bergelut di bidang pertanian, dan informasi ini mudah ditemukan serta diakses. |
| 21 Perizinan https://sicantikui.layanan.go.id/#/login | Informasi tentang perizinan di Kabupaten Manggarai. Berpotensi mempermudah proses perizinan bagi masyarakat. | Masyarakat cukup sering mengakses perizinan untuk mencari informasi terkait persyaratan dan prosedur perizinan, namun informasi yang tersedia sulit ditemukan dan dipahami. |
| 22 Kanal Pengaduan https://www.lapor.go.id/ | Saluran pengaduan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan kepada Pemkab Manggarai. Menyediakan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Link ini mengarah ke website LAPOR! (https://www.lapor.go.id/), yang merupakan platform nasional. | Masyarakat jarang mengakses kanal pengaduan karena hanya digunakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait layanan publik, namun informasi ini mudah ditemukan dan diakses. |
| 23 Pusat Data https://satudata.manggarikab.go.id/ | Hal ini sesuai dengan ketentuan UU KIP yang mewajibkan badan publik menyediakan data dan informasi publik lainnya. Fitur ini menyediakan akses kepada data dan statistik yang relevan, seperti data kependudukan, ekonomi, dan sosial. Berpotensi menyediakan data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan. Link mengarah ke https://satudata.manggarikab.go.id/ . | Masyarakat jarang mengakses pusat data karena hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan data dan statistik untuk penelitian atau keperluan lainnya, meskipun data yang tersedia cukup mudah diakses namun terkadang sulit ditemukan atau diolah. |

| | | |
|--|---|---|
| 24 Produk Hukum https://www.manggaraikab.go.id/produk-hukum/ | Hal ini sejalan dengan ketentuan UU KIP yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tentang produk hukum. Fitur ini menyediakan akses langsung kepada peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan berbagai produk hukum lainnya. Sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas. | Masyarakat sedang mengakses produk hukum karena ingin mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah, dan informasi ini disajikan dengan lengkap, terstruktur, serta mudah diakses. |
| 25 PPID http://ppid.manggaraikab.go.id/ | Fitur ini merupakan representasi fisik dari pelaksanaan Undang-Undang KIP di tingkat pemerintah daerah. Melalui PPID, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan mendapatkan respons yang cepat dan tepat. Untuk mengakses PPID dalam website Pemkab Manggarai di perlukan registrasi terlebih dahulu. | Masyarakat sangat jarang mengakses PPID karena hanya digunakan oleh masyarakat yang ingin mengajukan permintaan informasi publik secara formal, dan informasi yang tersedia sulit ditemukan dan dipahami. |
| 26 LPPL RSPD https://www.manggaraikab.go.id/lppl-rspd/ | Fitur ini merupakan representasi fisik dari pelaksanaan Undang-Undang KIP di tingkat pemerintah daerah. Melalui PPID, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan mendapatkan respons yang cepat dan tepat. Untuk mengakses PPID dalam website Pemkab Manggarai di perlukan registrasi terlebih dahulu. | Masyarakat sangat jarang mengakses LPPL RSPD karena hanya ingin mendengarkan radio streaming daerah, dan informasi ini mudah ditemukan serta diakses. |

Sumber: Data Primer, Agustus 2024.

Hasil analisis dari tabel ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam frekuensi akses dan tujuan penggunaan masing-masing jenis informasi. Informasi terkait berita umum, COVID-19, dan pariwisata cenderung lebih sering diakses, menunjukkan minat masyarakat terhadap isu-isu terkini dan potensi daerah. Sebaliknya, informasi seperti berita olahraga, lelang, dan lalu lintas kurang diminati, mengindikasikan perlunya evaluasi dan promosi yang lebih efektif untuk jenis informasi ini. Tujuan penggunaan informasi juga beragam, mulai dari mencari berita terkini, memantau perkembangan pandemi, merencanakan perjalanan wisata, hingga mengakses layanan publik dan memahami produk hukum. Kemudahan akses secara umum dinilai baik, namun terdapat beberapa kendala, terutama terkait pencarian informasi tertentu dan pemahaman prosedur layanan publik. Kendala-kendala ini perlu diidentifikasi dan diatasi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi seluruh masyarakat.

2) Kejelasan dan Akurasi Informasi

Kejelasan dan akurasi informasi merupakan aspek krusial dalam komunikasi yang efektif. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami oleh masyarakat dan terbebas dari kesalahan, karena informasi yang lengkap tidak akan bermanfaat jika sulit dipahami atau tidak akurat. Hasil wawancara dengan para pejabat Diskominfo menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya kejelasan dan akurasi informasi.

Kabid KIP menjelaskan proses penyediaan informasi yang melibatkan tahapan identifikasi, penulisan, penyuntingan, hingga publikasi untuk memastikan akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini mencakup perencanaan, penyesuaian kebutuhan, pengumpulan bahan tulisan, dan penyuntingan oleh redactor sebelum dipublikasikan dan dilaporkan kepada pimpinan. "Berita yang dipublikasikan tentu saja yang pertama bentuk dari website, tampilan dari publikasi itu sendiri, kedua merencanakan menyesuaikan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita-berita, artikel-artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi kegiatan dari perangkat daerah (rutin) dilayangkan surat perintah kepada perangkat daerah untuk mempublikasikan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang akan dipublikasikan. Lalu dipilah dan menyunting melalui redactor agar tidak ada yang salah dari berita yang akan dipublikasikan. Dari redactor lalu dilaporkan kepada pimpinan apakah berita tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan, lalu dilaporkan secara berkala kepada pimpinan," ujar Methonius Santosa Jemat selaku kepala bagian Komunikasi dan Informatika (KIP). Namun, hasil kuesioner menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang merasa informasi yang tersedia di website kurang lengkap. Sebanyak 17% (17 orang) dari 100 % (100 orang) responden menyatakan informasi yang mereka butuhkan belum tersedia di website. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyuntingan dan verifikasi, meskipun ada, belum sepenuhnya menjamin kelengkapan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan dan akurasi informasi perlu terus ditingkatkan, terutama dalam memastikan informasi yang disajikan lengkap dan komprehensif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi dalam e-government untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan. Meskipun website telah menyediakan beragam informasi dan secara umum mudah diakses, namun masih perlu upaya untuk meningkatkan kelengkapan informasi, mengevaluasi jenis informasi yang disediakan, serta membangun mekanisme umpan balik yang lebih efektif.

3) Umpan Balik

Mengenai umpan balik, hasil wawancara menunjukkan bahwa Diskominfo Manggarai belum memiliki mekanisme umpan balik yang terintegrasi langsung dengan website. Meskipun ada kotak saran, namun saran tersebut tidak langsung ditangani oleh Diskominfo, melainkan melalui portal pusat. Hal ini tentu mengurangi efektivitas mekanisme umpan balik, karena Diskominfo tidak dapat langsung merespons atau menindaklanjuti saran yang masuk. "Terkait keluhan dan masukan dari masyarakat, masyarakat kan menginginkan pemerintah daerah yang sempurna untuk menginformasikan segala kegiatan-kegiatan pada saat-saat seperti itu juga kita tidak mengupdate secara keseluruhan mungkin karena ada keterbatasan untuk meliputi semua kegiatan-kegiatan pemerintah tetapi itu merupakan suatu dukungan untuk kami untuk lebih memprioritaskan itu supaya kami bisa melengkapi dan memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat apalagi era Keterbukaan Informasi," kata Kadis Kominfo, Heri Jelamu. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 55 orang dari 100 orang responden merasa informasi yang mereka dapatkan dari website membantu mereka mengawasi kinerja pemerintah. Namun, belum adanya mekanisme umpan

balik yang efektif membuat masyarakat tidak memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan aspirasi atau masukan mereka terkait kinerja pemerintah maupun informasi yang disajikan di website.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur dan anggaran, merupakan fondasi penting dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, sulit untuk mewujudkan sistem informasi publik yang efektif dan berkelanjutan.

1) Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai, termasuk server dan jaringan internet, menjadi tulang punggung ketersediaan informasi publik melalui website. Hasil wawancara dengan Kabid TIK menunjukkan bahwa website Pemkab Manggarai menggunakan server pemerintah daerah yang berlokasi di Diskominfo, dan memanfaatkan jaringan internet dari dua provider, yaitu ASTINET dan Telkom. "Untuk pengelolaan website sendiri yang pertama ketersediaan server karena diskominfo menggunakan server pemda dan itu posisinya di diskominfo sendiri, kedua jaringan internet menggunakan pihak ketiga ada dua yaitu ASTINET dan Telkom," ujar Metilda Herlina Irma selaku kepala bagian Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur yang digunakan untuk website Pemkab Manggarai secara umum cukup memadai, dengan adanya server sendiri dan dukungan jaringan internet dari dua provider.

2) SDM

Ketersediaan SDM yang kompeten, terutama di bidang IT, sangat penting untuk memastikan pengelolaan website yang profesional dan efektif. Hasil wawancara dengan berbagai pejabat di Diskominfo mengungkapkan adanya kekurangan SDM yang signifikan, terutama tenaga ahli di bidang IT. Kadis Kominfo, Heri Jelamu, mengakui bahwa total pegawai Diskominfo hanya 32 orang, termasuk tenaga honorer. Beliau juga menekankan peran penting Diskominfo dalam publikasi informasi melalui berbagai media, termasuk website. Sekretaris Diskominfo, Paulus Jeramu, menambahkan bahwa kekurangan SDM menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi KIP. Kabid KIP, Methonius Santosa Jemat, secara spesifik menyebutkan kekurangan staf di bidang KIP, yang berdampak pada pengelolaan website. Kabid Persandian dan Statistik, Valentinus Akian, menjelaskan bahwa Diskominfo tidak memiliki tenaga ahli khusus di bidang IT, terutama untuk keamanan data. Mereka hanya mengandalkan staf yang belajar secara otodidak, dan bahkan tenaga ahli yang sebelumnya ada telah pensiun. "Untuk saat ini kami di bidang persandian dan statistik sendiri bertugas untuk pengamanan dan cyber tetapi diskominfo sendiri tidak punya tenaga ahlinya jadi yang selama ini dipakai adalah bapak kabid yang sebelumnya yang sudah pensiun karena beliau satu-satunya yang ahli dalam bidang itu tapi selain itu (staf) belum ada," ujar Valentinus Akian. Keterbatasan SDM ini tentu menjadi kendala dalam pengelolaan website, terutama terkait keamanan data dan pengembangan fitur-fitur yang lebih kompleks. Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas konten dan desain website.

3) Anggaran

Terkait anggaran, Ketersediaan anggaran yang cukup sangat penting untuk mendukung operasional dan pengembangan website, termasuk pemeliharaan server dan jaringan, pengembangan fitur baru, pengadaan konten, dan honorarium SDM. Sayangnya, dari hasil wawancara tidak diperoleh informasi yang eksplisit mengenai alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan website. Namun, dapat diasumsikan bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan ini pasti ada, meskipun mungkin tidak disebutkan secara rinci. Anggaran untuk pengelolaan website dapat mencakup berbagai aspek, seperti: Pemeliharaan server dan jaringan, Pengembangan fitur-fitur baru, Konten website (penulisan artikel, desain grafis, dll.), SDM (gaji tenaga ahli, pelatihan, dll.). Tanpa adanya informasi yang pasti mengenai anggaran ini, sulit untuk menilai apakah anggaran yang dialokasikan mencukupi atau tidak. Namun, jika melihat dari keterbatasan SDM dan belum optimalnya beberapa fitur website, ada kemungkinan anggaran yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

c. Disposisi

Disposisi mengacu pada komitmen dan dukungan dari para pejabat dan staf Pemkab Manggarai terhadap implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik. Hal ini mencakup komitmen pejabat, dukungan pimpinan daerah, dan motivasi staf.

1) Komitmen Pejabat

Komitmen pejabat, terutama pimpinan tertinggi di Diskominfo dan jajaran di atasnya, menjadi fondasi penting dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Wawancara dengan para pejabat Diskominfo menunjukkan adanya pengakuan akan pentingnya website sebagai sarana informasi publik. "Peran diskominfo dalam ketebukaan informasi publik sendiri sesuai namanya yaitu mempublikasikan melalui berbagai macam media salah satunya website pemkab manggarai peran diskominfo adalah semua kegiatan-kegiatan selalu kita informasikan melalui media ini, ada juga web yang ada di OPD tetapi koordinasinya tetap dengan diskominfo," ujar Heri Jelamu selaku Kadis Diskominfo Kabupaten Manggrai. Namun demikian, komitmen ini perlu diuji lebih lanjut dalam tataran implementasi. Data kuesioner menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas di lapangan. Sebagian responden masih merasa kesulitan mengakses informasi yang dibutuhkan, atau merasa informasi yang tersedia kurang lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan dalam tindakan nyata yang berdampak pada perbaikan kualitas dan aksesibilitas informasi di website.

2) Dukungan Pimpinan Daerah

Dukungan dari pimpinan daerah merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government. Sayangnya, dari data yang ada belum diperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana dukungan pimpinan daerah terhadap implementasi e-government di website Pemkab Manggarai. Namun, dapat diasumsikan bahwa dukungan pimpinan daerah memiliki peran penting dalam alokasi anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan website. Jika pimpinan daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik, maka kemungkinan besar akan ada dukungan yang memadai untuk pengembangan dan pengelolaan website.

3) Motivasi Staf

Motivasi staf juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan website. Hasil wawancara dengan para pejabat Diskominfo menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi untuk memberikan informasi publik yang akurat dan relevan melalui website. "Mengenai mekanisme permintaan informasi publik terkait dengan PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) dapat diakses PPID yang dikelola langsung oleh PPID segala jenis dokumen yang diperlukan ada dalam aplikasi PPID tersebut," ujar Kabid KIP, Methonius Santosa Jemat yang juga merupakan admin PPID. Namun, motivasi ini perlu didukung dengan sumber daya yang memadai, terutama tenaga ahli di bidang IT. Keterbatasan SDM yang kompeten dapat mempengaruhi kualitas konten dan pengelolaan website secara keseluruhan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif merupakan fondasi penting bagi keberhasilan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Struktur yang baik memastikan koordinasi yang efisien, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan akuntabilitas yang terukur.

1) Koordinasi

Hasil Koordinasi yang baik antar unit kerja terkait sangat penting dalam pengelolaan website. Wawancara dengan para pejabat Diskominfo menunjukkan adanya mekanisme koordinasi dalam pengelolaan website. Kabid KIP menjelaskan peran sentral Diskominfo dalam publikasi informasi. "Di bidang KIP semuanya di KIP sampai dengan berita di rilis di web Pemkab Manggarai," ujar Methonius Santosa Jemat. Kabid TIK juga menjelaskan keterlibatan berbagai bidang di Diskominfo dalam pengelolaan website, seperti bidang KIP untuk konten, bidang TIK untuk menu dan desain, serta bidang persandian dan statistik untuk keamanan informasi. "Dalam pengelolaan website semuanya ada perannya masing-masing kalau Pak Ody (KIP) mengelola konten, pengelolaan media komunikasi publik sedangkan di TIK melakukan update terkait menu-menu, desain yang ada dalam website, sedangkan bidang persandian dan statistik terkait keamanan informasi jangan sampai ada yang meretas, mengedit tanpa sepengetahuan Diskominfo," ujar Metilda Herlina Irma sebagai kabid TIK. Namun, koordinasi yang ada tampaknya belum berjalan optimal. Adapun yang disampaikan Kabid KIP dalam wawancara yang menyoroti kendala komunikasi dengan OPD lain terkait penyediaan informasi publik yang mengatakan "Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website KIP disini selama ini satu arah dimana informasi publik yang disediakan dinas kominfo yang mencari sendiri tidak ada proaktif dari perangkat daerah mestinya untuk informasi publik itu adalah kewajiban dari badan publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang mana semua Badan Publik yang pengelolaannya menggunakan APBN, APBD intinya menggunakan keuangan negara itu wajib untuk melaporkan atau mempublikasikan apa saja kegiatan-kegiatan mereka kepada masyarakat, yang terjadi selama ini mungkin karena kurangnya komunikasi dll sehingga para perangkat daerah lambat merespon (publikasi iya tetapi ritme nya lambat)." Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi perlu ditingkatkan agar informasi

publik yang tersedia di website lebih lengkap dan komprehensif dan dapat mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan regulasi yang dibuat pemerintah kabupaten Manggarai yaitu dengan dibuatnya Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2) Tanggung Jawab

Wawancara dengan para pejabat Diskominfo menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait pengelolaan website. Kabid KIP bertanggung jawab atas konten dan media komunikasi publik, Kabid TIK bertanggung jawab atas update menu dan desain, serta bidang persandian dan statistik bertanggung jawab atas keamanan informasi. "Tugas dan peran dan tanggung jawab terhadap website sebenarnya ada banyak tugas dan wewenang salah satunya pengelolaan website yang mengarah pada KIP oleh Diskominfo perannya lebih sentral dari pada yang lain terkait publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat di bidang KIP semuanya di KIP sampai dengan berita di rilis di web Pemkab Manggarai," ujar Methonius Santosa Jemat. Pembagian tugas ini penting untuk memastikan semua aspek pengelolaan website tertangani dengan baik. Namun, perlu dipastikan apakah pembagian tugas ini dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang, serta apakah ada mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik.

3) Akuntabilitas

Mengenai akuntabilitas, belum ada informasi yang jelas dari hasil wawancara mengenai mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk mengawasi pengelolaan website. Namun, Kabid KIP menjelaskan bahwa berita yang akan dipublikasikan harus melalui proses redaksi dan dilaporkan kepada pimpinan. "Dari redactor lalu dilaporkan kepada pimpinan apakah berita tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan, lalu dilaporkan secara berkala kepada pimpinan," ujar Methonius Santosa Jemat. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme kontrol internal dalam pengelolaan website. Namun, perlu dipastikan apakah mekanisme ini berjalan efektif dan apakah ada mekanisme akuntabilitas yang lebih luas, seperti audit atau evaluasi dari pihak eksternal.

4. Hambatan dan Dampak Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui website tidak terlepas dari berbagai tantangan dan konsekuensi. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas hambatan dan dampak yang ada, yang dikelompokkan berdasarkan hambatan internal yang berasal dari dalam pemerintahan Kabupaten Manggarai, khususnya terkait pengelolaan website dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik. dan hambatan eksternal yang berasal dari luar kendali langsung pemerintah Kabupaten Manggarai, serta menguraikan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul.

4.1. Identifikasi Hambatan Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website

Hambatan-hambatan ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1) Hambatan Internal

Dua hambatan internal utama yang ditemukan adalah:

- a. Sumber Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas: Kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan website, menjadi kendala utama. Hal ini berdampak pada kualitas dan kecepatan pembaruan informasi di website. Hal ini dapat di benarkan oleh Kadis Diskominfo yang mengatakan total yang bekerja ada 32 (termasuk honorer) meski tidak dijelaskan terkait pendidikan akhir setiap pegawai secara jelas hal ini sendiri sudah menunjukkan kurangnya SDM di Dinas Kominfo Manggarai. Adapun yang diungkapkan kan Kabid Statistik dan Persendrian Bapak Valetinus Akian bahwa “tidak ada tenaga ahli khusus di bidang IT (Information Technology) atau Teknologi Informasi secara khusus pada bidang keamanan data (cyber), yang direkrutmen selama ini untuk staf hanya untuk persandian saja itupun level nya juga masih belum karena untuk mencapai pengamanan di cyber sendiri harus yang level nya sudah diatas atau mungkin yang memang bidang nya sendiri adapun yang disini tetapi bidang nya matematika”. Pernyataan ini tentu saja menguatkan temuan penulis terkait salah satu hambatan dalam faktor internal dalam implementasi keterbukaan informasi publik melalui website yaitu SDM yang kurang memadai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan website <https://www.manggaraikab.go.id/> secara langsung.
- b. Kurangnya koordinasi antar OPD: Kurangnya koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam penyediaan dan pembaruan informasi menyebabkan keterlambatan dan ketidakkonsistenan data seperti yang diungkapkan oleh Kabid KIP Bapak Methonius Santosa Jemat bahwa “Kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaan website KIP disini selama ini satu arah dimana informasi publik yang disediakan dinas kominfo yang mencari sendiri tidak ada proaktif dari perangkat daerah”. Hal ini sejalan dengan temuan penulis yaitu salah satu hambatan faktor internal dalam implementasi keterbukaan informasi publik melalui website yaitu kurangnya koodrinasi antara Diskominfo dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2) Hambatan Eksternal

Tiga hambatan eksternal utama yang ditemukan adalah:

- a. Infrastruktur teknologi yang belum memadai
Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi publik melalui website. Kabupaten Manggarai terbagi dalam 12 kecamatan, yang terdiri dari 145 desa dan 26 kelurahan, dengan total 171 wilayah administratif. Data spesifik dan terperinci mengenai cakupan jaringan di setiap desa seringkali tidak dipublikasikan secara terbuka dan bisa berubah seiring waktu dengan

perkembangan infrastruktur. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, saya dapat memberikan beberapa indikasi wilayah di Manggarai yang secara umum diketahui memiliki tantangan akses internet, yaitu wilayah dengan geografis sulit seperti desa-desa yang berada di daerah pegunungan, perbukitan, atau lokasi terpencil cenderung memiliki infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai. Ini karena biaya pembangunan dan pemeliharaan jaringan di area tersebut lebih tinggi. Contohnya, beberapa desa di kecamatan seperti Reok Barat, Satar Mese Barat, Rohong Utara, dan Cibai Barat kemungkinan menghadapi tantangan ini. Artikel berita yang saya temukan juga menyebutkan bahwa ada 10 desa di Kecamatan Reok Barat yang belum terjangkau jaringan telepon dan internet. Desa-desa di Kecamatan Reo: Beberapa laporan menyebutkan bahwa masih ada sekolah-sekolah di kecamatan ini yang kesulitan mengakses internet. Ini mengindikasikan bahwa masalah akses internet menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk mengakses website Pemkab Manggarai.

- b. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi dan cara mengaksesnya melalui website masih tergolong rendah, yang dapat dilihat dari survei kepuasan pengguna website terhadap keterbukaan informasi publik di website Pemkab Manggarai. Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna yang diambil dari kuesioner terhadap 100 orang yang pernah menggunakan website Pemkab Manggarai <https://www.manggaraikab.go.id/>. dapat dianalisis tingkat kepuasan mereka terhadap keterbukaan informasi publik yang tersedia hasil Jawaban 100 Orang Responden Yang Pernah Mengakses Website Pemkab Manggarai Terkait Kepuasan Pengguna Website Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Yang Disediakan pada Website Pemkab Manggarai hasil survei tersebut menggambarkan hasil survei tersebut, di mana mayoritas responden, yaitu 59 orang atau 59%, menyatakan "Cukup Puas." Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna menilai informasi yang tersedia di website sudah memadai, meskipun demikian, masih terdapat potensi perbaikan di beberapa area, sehingga kategori "Cukup Puas" ini dapat diinterpretasikan sebagai posisi tengah antara kepuasan dan ketidakpuasan. Selanjutnya, sebanyak 28 responden atau 28% memberikan respons "Sangat Puas," yang merupakan indikasi positif bahwa sebagian pengguna sangat mengapresiasi keterbukaan informasi yang disajikan di website. Kelompok ini kemungkinan besar merasa informasi yang dibutuhkan mudah diakses, lengkap, dan up-to-date. Sementara itu, terdapat 13 responden atau 13% yang menyatakan "Kurang Puas," yang menandakan bahwa masih ada sebagian pengguna yang merasa informasi yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti informasi yang kurang lengkap, sulit diakses, atau kurang diperbarui. Akan tetapi, satu hal yang menarik adalah tidak ada responden yang memilih "Sangat Tidak Puas," yang merupakan hal positif karena menunjukkan bahwa tidak ada pengguna yang merasa sangat kecewa dengan keterbukaan informasi di website. Oleh karena itu, secara keseluruhan, hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar pengguna, yang terdiri dari 59% yang cukup puas dan 28% yang sangat puas (total 87%), memiliki

pandangan positif terhadap keterbukaan informasi di website Pemkab Manggarai. Meskipun demikian, keberadaan 13% responden yang merasa kurang puas menggarisbawahi adanya ruang untuk perbaikan. Lebih lanjut, perlu diingat bahwa meskipun website ini sangat berguna, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya. Dengan demikian, meskipun mayoritas responden yang telah mengakses website merasa cukup atau sangat puas, persentase masyarakat yang belum mengetahui keberadaan website tersebut berpotensi sangat besar, yang pada akhirnya berarti potensi manfaat website sebagai sarana keterbukaan informasi publik belum dimaksimalkan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari survei kepuasan pengguna website terhadap keterbukaan informasi publik pada website.

- c. Implementasi peraturan perundang-undangan yang belum optimal: Meskipun sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya SDM, kurangnya koordinasi antara OPD, dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti ini yang membuat kurang optimalnya PPID dalam menjalankan perannya untuk mengimplementasikan UU KIP Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.2. Dampak Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui website, selain menghadapi hambatan, juga membawa dampak, baik positif maupun negatif. Bagian ini akan menguraikan dampak-dampak tersebut.

1. Dampak Positif
 - a). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya website, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait kegiatan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan kebijakan publik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
 - b). Mempermudah akses informasi publik: Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Cukup mengakses website, informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah.
 - c). Meningkatkan partisipasi masyarakat: Website dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, atau keluhan terkait kebijakan publik. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
 - d). Mendorong akuntabilitas: E-government dapat mengurangi penggunaan kertas dan proses birokrasi yang rumit. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
2. Dampak Negatif
 - a). Beban kerja pegawai meningkat: Pegawai Diskominfo dan OPD terkait harus mengalokasikan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengelola dan memperbarui informasi di website.
 - b). Potensi disinformasi: Keterbukaan Informasi yang tidak akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dengan mudah tersebar melalui website. Hal ini

dapat menimbulkan disinformasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- c). Ancaman keamanan siber: Website pemerintah rentan terhadap serangan siber yang dapat menyebabkan kebocoran data atau gangguan layanan beberapa menu dan fitur yang ada di website Pemerintah Kabupaten Manggarai.
- d). Kesenjangan Akses: Tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan literasi digital yang sama. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan akses informasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu.

5. Kesimpulan

Secara umum, implementasi keterbukaan informasi publik melalui website Pemkab Manggarai telah berjalan, namun belum optimal. Website ini telah menyediakan beragam informasi, namun belum semua informasi diakses dengan frekuensi yang sama oleh masyarakat. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala akses terhadap informasi tertentu. Analisis 4 Variabel: (a) Komunikasi: Informasi yang disajikan umumnya mudah diakses, namun kelengkapan dan detailnya perlu ditingkatkan. Mekanisme umpan balik belum efektif; (b) Sumber Daya: Infrastruktur website cukup memadai, namun kapasitasnya perlu dipastikan. Anggaran perlu dievaluasi dan mungkin ditingkatkan. Keterbatasan SDM di bidang IT merupakan kendala signifikan; (c) Disposisi: Komitmen pejabat dan motivasi staf cukup baik, namun dukungan nyata dari pimpinan daerah masih kurang; (d) Struktur Birokrasi: Koordinasi antar OPD perlu ditingkatkan. Tanggung jawab pengelolaan website perlu diperjelas, termasuk mekanisme akuntabilitasnya. Hambatan-hambatan ini berdampak pada akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat sulit mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah jika informasi tidak lengkap dan akurat. Perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta meningkatkan kualitas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, website Pemkab Manggarai dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi, Membangun Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Manggarai, Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai, diakses pada 16 April 2024, dari <https://manggaraikab.bps.go.id/>
- Basuki Reksodigdo, "Keterbukaan Informasi Publik: Pilar Penting Good Governance". *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada* 14, no. 2 (2008): 234-245.
- Basuki, R. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) dalam laporan pada tahun 2022, 10-25.
- George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

- Hidayat, K. *Membangun Demokrasi Berkualitas: Dari Politik Prosedur ke Politik Substansi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, *Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government*, September 2002, 3-8.
- Kurniawati, D. "Analisis Kualitas Website Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Menyediakan Informasi Publik". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 25, no. 1 (2021): 76.
- Mihradi, R Muhammad. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nugroho Dwijowijoto, Riant. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2003.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pengunjung Website, diakses pada 16 April 2024, dari <https://www.manggaraikab.go.id/>
- Purwanto, A.J. *E-Government di Indonesia: Studi Implementasi dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2019.
- Santosa, Budi. *Membangun Good Governance Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sirajudin, M., dkk. "Good Governance dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara: Universitas Gadjah Mada* 14, no. 2 (2008): 39-40.
- Sirajudin, M., dkk. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2011.
- Suryanto, A. *E-Government di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Prospek*. Bandung: Institut Teknologi Bandung Press, 2019.
- Syaifuddin, A. *E-Government: Menuju Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berkinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Wahyudi, D. *E-Government: Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Wijayanto, T. "E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik: Sebuah Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang." *Jurnal Administrasi Publik* 24, no. 2 (2020): 186.
- Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. *Pemerintahan elektronik*, diakses pada 2 April 2024, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik